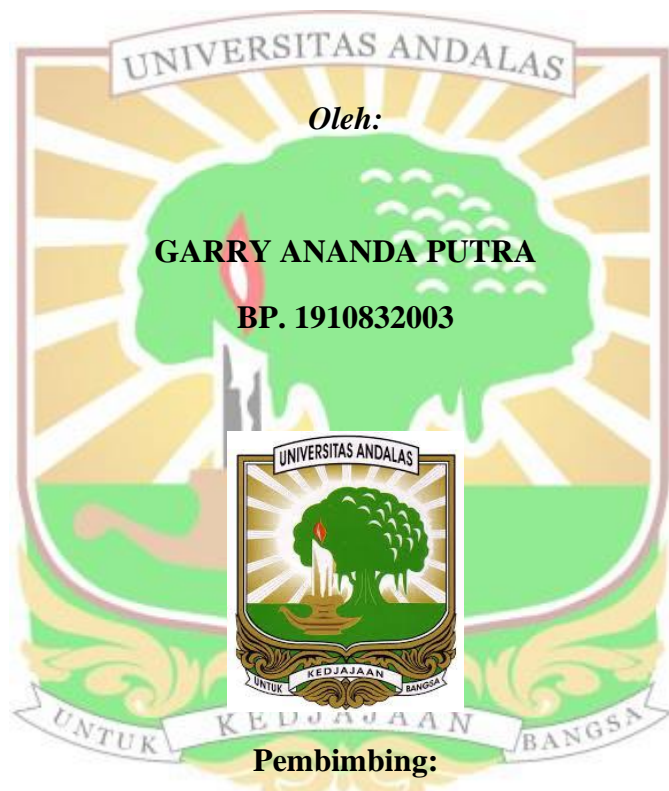


**KEPENTINGAN DALAM MUTASI APARATUR SIPIL
NEGARA DI KABUPATEN BUNGO PADA TAHUN 2021**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



1. Drs. Syaiful, M.Si
2. Drs. Tamrin, M.Si

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

ABSTRAK

Pengaruh politik terhadap birokrasi atau yang biasa dikenal dengan istilah politisasi birokrasi yang merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Pasca pemilihan kepala daerah keinginan merombak pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan daerah bisa meningkat. Mutasi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara merupakan suatu dinamika manajemen kepegawaian pada pemerintah daerah yang menimbulkan fenomena profesional maupun politis. Pasca pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2020, Bupati Bungo terpilih, Mashuri melakukan mutasi terhadap sebanyak 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bungo. Hal yang menarik perhatian masyarakat adalah pemindahan terhadap staf tersebut untuk penempatan di kecamatan-kecamatan yang jauh, seperti di Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kecamatan Jujuhan. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan kepala daerah dalam melakukan politisasi birokrasi pada pelaksanaan mutasi ASN pasca pemilihan kepala daerah berlangsung di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori politisasi birokrasi oleh Barbara Geddes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Bupati Bungo terhadap birokrasi adalah menginginkan mesin birokrasi yang loyal agar kemudian mampu memenuhi kepentingannya dalam mewujudkan visi-misi dalam hal pembangunan Kabupaten Bungo dan juga kepentingan lainnya seperti mempertahankan kekuasaannya.

Kata Kunci: Politisasi Birokrasi; Mutasi ASN; Pemilihan Kepala Daerah; Kabupaten Bungo



ABSTRACT

The influence of politics on the bureaucracy or commonly known as the politicization of the bureaucracy is one of the phenomena that often occurs in government bodies. After the regional head elections, the desire to reorganize civil servants or the state civil apparatus within the scope of regional administration can increase. Mutations of civil servants or state civil servants are a dynamic of staffing management in local governments that give rise to professional and political phenomena. After the 2020 Bungo Regency regional head election, the Bungo Regent was elected, Mashuri transferred more than 26 State Civil Apparatuses (SCA) in Bungo Regency. What caught the community's attention was the transfer of these staff to remote sub-districts, such as in Bathin III Ulu District, Tanah Tumbuh District, and Jujuhan District. This thesis aims to identify and analyze the interests of regional heads in politicizing the bureaucracy in the implementation of ASN mutations after the regional head elections took place in the Bungo Regency government environment. This study uses a qualitative method with a case study approach to answer research question. The theory used is the theory of bureaucratic politicization by Barbara Geddes. The results of this study indicate that the Bungo Regent's interest in the bureaucracy is to want a loyal bureaucratic machine so that it is then able to fulfill its interests in realizing the vision and mission in terms of developing Bungo Regency and also other interests such as maintaining its power.

Keywords: *Politicization of Bureaucracy; SCA Transfer; Regional Head Elections; Bungo Regency*

